



**LAPORAN  
KUNJUNGAN KERJA KOMISI VII DPR RI  
KE PROVINSI SUMATERA UTARA**

**MASA RESES MP IV  
TAHUN SIDANG 2017-2018**

**KOMISI VII  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT INDONESIA  
2018**

# BAGIAN I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Provinsi Sumatera Utara terletak pada 1 – 4 derajat Lintang Utara dan 98 – 100 derajat Bujur Timur dengan luas daratan mencapai 72,98 ribu kilometer per segi. Batas wilayah Provinsi Sumatera Utara, sebelah utara Provinsi Aceh dan Selat Malaka, sebelah selatan Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Barat, Samudera Indonesia, sebelah Barat Provinsi Aceh dan Samudera Indonesia, sebelah Timur Selat Malaka. Terdapat 419 Pulau di provinsi Sumatera Utara. Provinsi Sumatera Utara terdiri dari 25 Kabupaten dan 8 Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 14 juta jiwa.

Ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian Komisi VII DPR RI atas perkembangan pembangunan dan perekonomian di Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan bidang Komisi VII DPR RI di sektor energi, migas, lingkungan hidup dan ristek, antara lain :

1. Misi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara “Membangun dan mengembangkan ekonomi daerah melalui *pengelolaan sumber daya alam lestari berkelanjutan dan berwawasan lingkungan*”.
2. Bahwa pembangunan wilayah selain meningkatkan daya saing wilayah juga mengupayakan keseimbangan pembangunan antar daerah sesuai dengan potensinya masing masing. Perkembangan indikator utama dalam pembangunan wilayah meliputi pertumbuhan ekonomi, pengurangan pengangguran, dan pengurangan kemiskinan dapat menggambarkan capaian kinerja pembangunan wilayah secara umum.
3. Kualitas pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi biasanya diikuti oleh pengurangan kemiskinan, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta perluasan lapangan kerja.

4. Berdasarkan data dari BPS Provinsi Sumatera Utara pada September 2017, jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara mencapai 1,326 juta orang (9,28%) menurun 127 ribu orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2017 yang berjumlah 1,453 juta orang (10,22%). Beberapa faktor utama yang mempengaruhi menurunnya jumlah kemiskinan antara lain pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara dari 4,5% pada TRW I/2017 menjadi 5,21% pada TRW III/2017, angka inflasi relatif stabil hanya 2,15%, turunnya angka pengangguran dari 6,41% di Februari 2017 menjadi 5,6% pada bulan Agustus 2017.
5. Sumberdaya energi merupakan sarana produksi dan sarana kehidupan sehari-hari yang memegang peran penting dalam pembangunan. Ketersediaan energi yang berkesinambungan, handal, terjangkau dan ramah lingkungan merupakan hal yang fundamental dalam membangun industri energi yang bisa mendukung perkembangan ekonomi dan sosial suatu negara.
6. Kecukupan energi menjadi salah satu indikator bangkitnya daerah dalam berbagai sektor riil, industri dan tumbuhnya pelaku ekonomi sehingga meningkatkan perekonomian. Potensi sumberdaya alam terbarukan terdapat di sebagian wilayah Sumatera Utara namun belum dimanfaatkan secara maksimal, terutama air dan panas bumi. Dengan sebaran potensi energi primer pembangkit tenaga listrik seperti air dan panas bumi yang besar seharusnya Sumatera Utara mampu memenuhi kebutuhan energi listriknya sendiri.
7. Kelistrikan merupakan pilar utama yang harus dikembangkan untuk memajukan ekonomi suatu daerah, karena ketersediaan listrik merupakan kebutuhan utama setiap investor yang ingin membangun industri.

## **B. Dasar Hukum Kunjungan Kerja**

Dasar Hukum pelaksanaan kunjungan kerja masa reses Komisi VII DPR RI adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib.
3. Keputusan Rapat Internal Komisi VII DPR RI tentang Agenda Kerja Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2017-2018.

### **C. Maksud dan Tujuan Kunjungan Kerja**

Maksud diadakannya Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI ke Provinsi Sumatera Utara adalah dalam rangka menyerap aspirasi dan melihat secara langsung perkembangan di daerah khususnya pengelolaan energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup serta riset dan teknologi.

Adapun tujuan kunjungan kerja ini, ingin mendapatkan informasi terkini dan masalah yang dihadapi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara serta dukungan dan solusi yang telah dan akan dilaksanakan oleh mitra kerja Komisi VII DPR RI terkait bidang ener energi dan sumber daya mineral, distribusi dan harga BBM dan Gas, kelistrikan, lingkungan hidup serta riset dan teknologi, yang meliputi :

1. Implementasi Misi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam “Membangun dan mengembangkan ekonomi daerah melalui *pengelolaan sumber daya alam lestari berkelanjutan dan berwawasan lingkungan*”.
2. Ekspektasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kepada mitra kerja Komisi VII DPR RI (Kementerian ESDM, Kementerian LHK – khusus Lingkungan Hidup, Kementerian Ristek Dikti – khusus Ristek beserta LPNKnya; BPPT, LAPAN, LIPI, BAPETEN, BIG, BATAN), untuk mewujudkan Sumatera Utara sebagai provinsi yang berdaya saing menuju Sumatera Utara sejahtera.
3. Mendapat penjelasan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tentang kondisi terkini Kelangkaan BBM khususnya Solar dan

Premium dan mencari masukan dari pihak terkait untuk menciptakan skenario jangka pendek dan menengah mengatasinya.

4. Mendapat penjelasan tentang janji PT PLN (Persero) untuk siap menjamin Investor masuk dan anti pemadaman bergilir di Sumatera Utara.
5. Membahas Gap Pasokan dan Kebutuhan Gas di Sumatera Utara dan mencari solusinya, agar geliat industri makin membaik serta kebutuhan masyarakat rumah tangga terpenuhi.
6. Pemanfaatan Iptek melalui Kementerian Ristek Dikti dan LPNK dalam mengoptimalkan potensi alam dan peningkatan daya saing
7. Pemanfaatan Kawasan Hutan dan Penanganan Pencemaran Lingkungan di Provinsi Sumatera Utara
8. Rencana Kerja PT PLN (Persero) terkait sebaran potensi energi baru dan terbarukan pembangkit tenaga listrik seperti air dan panas bumi yang dimiliki oleh Provinsi Sumatera Utara.

#### **D. Waktu dan Lokasi Kegiatan Kunjungan Kerja**

Waktu kunjungan kerja masa reses Komisi VII DPR RI dilaksanakan pada tanggal 30 April – 2 Mei 2018 dengan lokasi kunjungan ke Provinsi Sumatera Utara.

#### **E. Sasaran dan Hasil Kegiatan Kunjungan Kerja**

Sasaran dari kegiatan kunjungan kerja Komisi VII DPR RI ke Provinsi Sumatera Utara adalah melihat langsung untuk memperoleh informasi terkait dengan bidang Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM), Lingkungan Hidup (LH), serta Riset dan Teknologi (RISTEK) serta ketenagalistrikan, agar bisa menjadi rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam rapat-rapat Komisi VII DPR RI dengan mitra terkait, khususnya dalam melaksanakan fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran.

## F. Anggota Tim Kunjungan Kerja

Kunjungan kerja ini diikuti oleh Anggota Komisi VII DPR RI, yang merupakan representasi dari tiap-tiap fraksi, sebagaimana terlampir di bawah ini :

<b>DAFTAR NAMA ANGGOTA KUNJUNGAN KERJA KOMISI VII DPR RI KE PROVINSI SUMATERA UTARA RESES MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2017-2018 TANGGAL 30 April s/d 2 Mei 2018</b>				
<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>NO. ANGG.</b>	<b>FRAKSI</b>	<b>JABATAN</b>
1.	H. Gus Irawan Pasaribu, SE. Ak, MM, CA	A-327	Gerindra	KETUA TIM
2.	Tamsil Linrung	A-121	PKS	ANGGOTA
3.	Tony Wardoyo	A-231	PDIP	ANGGOTA
4.	H.N. Falah Amru, SE	A-203	PDIP	ANGGOTA
5.	Yulian Gunhar, SH, MH	A-136	PDIP	ANGGOTA
6.	Dony Maryadi Oekon	A-167	PDIP	ANGGOTA
7.	Mahyudin, ST, MM	A-307	Golkar	ANGGOTA
8.	Ramson Siagian	A-362	Gerindra	ANGGOTA
9.	H. Bambang Riyanto, SH, MH, M.Si	A-367	Gerindra	ANGGOTA
10.	H. Ikhwan Datu Adam, SE	A-447	Demokrat	ANGGOTA
11.	Bara Hasibuan, MA	A-500	PAN	ANGGOTA
12.	H. Agus Sulistyono, ST, MT.	A-61	PKB	ANGGOTA
13.	Ir. H. Tifatul Sembiring	A-85	PKS	ANGGOTA
14.	Dr. H. Andi Jamaro Dulung, M.Si	A-542	PPP	ANGGOTA
15.	Ferry Kase	A-558	Hanura	ANGGOTA
16.	Kus Indarwati, S.Sos			Sekretaris Tim
17.	Daday, SE			Sekretaris Tim
18.	Sugeng Trisasono, S.Sos			Sekretaris Tim

19.	Doddy Sylviadi	Tenaga Ahli
20.	Winni Citra Khadijah	TV Parlemen
21.	Rizka Arindindya, S.Sos	Media Cetak dan Medsos

## **BAB II**

### **PELAKSANAAN KEGIATAN KUNJUNGAN KERJA**

#### **A. Peresmian Jargas PT PGN (Persero) di Jl. Kruing – Medan**

Sebelum ke Kantor Gubernur Sumatera Utara, Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI lebih dahulu melaksanakan peresmian Jaringan Gas Baru yang terletak di Jalan Kruing, dimana merupakan Pusat Bolu Meranti Medan. Dalam kesempatan tersebut Direksi PT PGN (Persero) diwakili oleh Direktur Komersil – Danny Praditya.

#### **B. Pertemuan dengan Gubernur Sumatera Utara dan Mitra Kerja Komisi VII DPR RI**

Dalam pertemuan di Kantor Gubernur Sumatera Utara pada tanggal 30 April 2018 ini, Tim Kunjungan Komisi VII DPR RI diterima oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara dikarenakan Gubernur ada agenda kunjungan di Perancis dan Wakil Gubernur menghadiri acara Musrenbang di Jakarta, unsur Muspida Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Mitra Kerja Komisi VII DPR RI yaitu dari Kementerian ESDM, LHK, Ristek Dikti, SKK Migas, BPH Migas. PT Pertamina (Persero), PT PLN (Persero) serta beberapa LPNK yaitu BATAN, LIPI, yang kemudian dilanjutkan pada malam hari pertemuan sebagai pendalaman atas masalah yang dibahas di kantor Gubernur dengan mitra kerja Komisi VII DPR RI secara khusus yaitu PT Pertamina (Persero), PT Pertamina EP, PT PLN (Persero), PT PGN (Persero) dan BPH Migas dengan hasil yang dibahas sebagai berikut :

- 1) Paparan dan ekspektasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, antara lain :
  - a) Di Sumatera Utara kondisi kelistrikan per 28 April 2018 Beban Puncak sebesar 1.950 MW. Daya Mampu Pasok sebesar 2.150 MW, sehingga terdapat Cadangan sebesar 200 MW. Demand 5-6% per tahun. PT PLN (Persero) memperkirakan beban puncak pada tahun 2027 sebesar total 4.725 MW dan diperkirakan daya mampu pasok sebesar 3.104 MW.
  - b) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara siap memfasilitasi kebutuhan para investor yang berminat di bidang energi di Sumatera Utara. Beberapa Kawasan Industri telah memiliki IPP sendiri. PT PLN (Persero) bisa lebih fokus dalam pemenuhan kebutuhan listrik Rumah Tangga dan Industri.



- c) Harga Gas diharapkan bisa turun sampai di angka 8 US \$ per MMBTU agar dapat mendukung lebih pengembangan industri di Sumatera Utara
- 2) Arahan Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI  
Ada 4 (empat) hal utama yang perlu diperjuangkan di Provinsi Sumatera Utara ini yang terkait hajat hidup orang banyak yaitu :
- a) Harga Gas. Meskipun sdh berada di angka 9,95 US \$ per MMBTU tetapi masih relatif lebih tinggi dari provinsi lain di Indonesia.
  - b) Listrik. Meskipun pasokan sdh terpenuhi namun dalam realitasnya masih belum stabil, masih terjadi situasi padam tertentu di sepanjang tahun.
  - c) Disamping itu juga perlu dipastikan ketersediaan BBM khususnya Premium dan Solar yang dalam beberapa tahun ini selalu mengalami kelangkaan di pasar.
  - d) Informasi yang beredar terkait penjualan gas Tangguh ke Tiongkok dengan harga sebesar \$ 3 per mmbtu sementara PT PLN (Persero) untuk wilayah Sumatera Utara membeli dengan harga \$ 7,5 mmbtu
- 3) Penjelasan Mitra Kerja atas permasalahan yang dihadapi di Provinsi Sumatera Utara, sebagai berikut :
- a) Penjelasan dari PT PGN (Persero).  
Terkait Harga Gas. Ada 3 (tiga) hal yang mempengaruhi penetapan harga yaitu Harga Gas di Hulu, Fee Transmisi Gas dan Kebijakan Bagi Hasil. Saat ini PT PGN (Persero) mengalirkan Gas ke Sumatera Utara dari 3 (tiga) sumber gas yaitu sebanyak 4,7 MMBTUD dari Lapangan Gas Bumi NSO PSC, Lapangan Gas Bumi Pase PSC sebesar 3 BBTUD dan 4,8 BBTUD dari Lapangan Gas Bumi Pangkalan Susu, dengan Harga Gas di Hulu masing-masing :
- PHE NSO 4,7 BBTUD : \$ 6,95 + 1% ICP \$/MMBTU
  - Pertamina EP (Pangkalan Susu) 4,8 BBTUD : \$ 6,82 + 1% ICP \$/MMBTU  
Kehandalan Pasokan, sudah ada kesepakatan
  - Triangle Pase 3,0 BBTUD : \$ 6,95 + 1% ICP \$/MMBTU
- Mengenai fee transmisi untuk ketiga sumber tersebut adalah :
- Transmisi Arun – Belawan : \$ 1,88/MMBTU

- Transmisi Pangkalan Susu – Wampu : \$ 0,8 /MMBtu
- Transmisi Arun – Belawan : \$ 1,88/MMBtu

Mengenai kebijakan bagi hasil kewenangannya berada pada Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian ESDM dan Pemerintah Provinsi Aceh karena sumber gas berada di wilayah Provinsi Aceh.

Kehandalan pasokan gas di Medan saat ini telah diinisiasi dengan solusi pinjam stock melalui kesepakatan PT Pertamina (Persero), PT PGN (Persero) dan PT PLN (Persero) sehingga saat ini pasokan gas mencapai 14 BBTUD.

b) Penjelasan dari PT PLN (Persero)

Terkait adanya situasi padam tertentu sepanjang tahun di Provinsi Sumatera Utara adalah disebabkan adanya gangguan transmisi; bukan pada pembangkit, yang diakibatkan oleh cuaca dalam hal ini petir. Karena ini PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera telah mulai melaksanakan pemasangan penangkal petir untuk menjadi solusi agar tidak terjadi pada karena situasi tertentu.

c) Penjelasan dari BPH Migas dan PT Pertamina (Persero) terkait alokasi Premium dan Solar pada tahun 2018.

Pada tahun 2018 alokasi Premium untuk Provinsi Sumatera Utara sebesar 601.947 KL dan realisasi per April 2018 sebesar 96.944 KL. Sementara untuk Solar alokasi tahun 2018 sebesar 1.028.169 KL dan realisasi sebesar 241.449 KL per April 2018. Baik Solar maupun Premium alokasi untuk tahun 2018 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2017 yang masing-masing sebesar 1.079.990 KL dan 1.680.330 KL.

d) Paparan dari PT Pertamina EP terkait kejadian ledakan di illegal drilling tambang migas di Peureulak Aceh Timur.

- Insiden ledakan terjadi pada tanggal 25 April 2018 jam 01.15 WIB di KSO Kawai Energi yang berlokasi di illegal drilling tanah masyarakat Gampong Rantau Panjang Peureulak – Kabupaten Aceh Timur. Ledakan terjadi pada saat sedang dilaksanakan pemasangan chasing 2 inchi kemudia terjadi flowing.

- Langkah yang telah dilakukan oleh Pertamina dan juga Dirjen Migas dan SKK Migas adalah mengirimkan tenaga ahli dan tenaga ahli senior baik engineer, safety dan security serta mengirimkan bantuan 1 unit Fire Truck dan 1 unit Fire Jeep sebelum 12 jam.
  - Yang mengejutkan adalah bahwa kegiatan illegal drilling dan penyerobotan sumur ini bukan hanya di Peureulak, tetapi juga terdapat di 6 (enam) wilayah lain yaitu Telaga Said-Langkat, Mangun Jaya & Babat Toman – Musi Banyuasin, Pompa Air-Bajubang, Jirak-Pali dan Cepu-Jatim.
- 4) Dalam kesempatan kunjungan kerja ini, diserahkan oleh beberapa LPNK sebagai mitra kerja Komisi VII DPR RI hasil riset yang dapat dipakai oleh Pemda Sumut dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, yaitu :
- a) BATAN. Penyerahan Varietas Padi Si Denuk
  - b) LIPI. Penyerahan Pupuk Organik Hayati (POH) Beyonic Startmik
  - c) BAPETEN. Penyerahan Ijin (KTUN) dari Bapeten ke RS H. Adam Malik, RS Bunda Thamrin, RS Exarina, RS Murni Teguh dan Laboratorium Pramita.
  - d) BIG. Peta NKRI dan buku Cetak
  - e) LAPAN. Peta Satelit Sumatera Utara dalam bentuk digital di Hard Disk
  - f) BPPT. Paket Pakan Ternak berbahan baku limbah kelapa sawit dan Ikan Nila Nirwana-Vaksin Ikan “streptococcus” dan suplemen pakan pemercepat pertumbuhan ikan
  - g) Kementerian Ristek Dikti. Penyerahan sumbangan beasiswa sekolah dalam program bidik misi kepada 3 (tiga) orang mahasiswa/mahasiswa dari Sumatera Utara
  - h) Dana CSR dari PT Pertamina EP kepada masyarakat dalam rangka implementasi program bina masyarakat dan lingkungan

### **C. Kunjungan ke RS H. Adam Malik - Medan**

RS H. Adam Malik ini berdiri sejak tahun 1990, berada di bawah naungan Kementerian Kesehatan dan saat ini merupakan RS Rujukan Nasional untuk Pelayanan Jantung Terpadu, Pelayanan Onkologi Terpadu dan Pelayanan Transplantasi Organ yang telah menggunakan teknologi radiasi nuklir yang telah mendapat sertifikasi dari BATAN.

Di samping itu RS H. Adam Malik juga merupakan Pusat Pendidikan Kedokteran USU Medan, yang telah banyak mencetak dokter dokter muda di Medan.

Dalam kunjungan Tim Kunker Komisi VII DPR RI, terdapat suatu kondisi yang perlu menjadi perhatian bagi Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Kesehatan, dimana peralatan yang digunakan secara jumlah juga terbatas hanya 1 (satu) unit di setiap unit pelayanan di atas dan ada yang telah lama sekali usinya lebih dari 25 tahun. Menurut manajemen RS H. Adam Malik yang saat itu menerima Tim Kunker Komisi VII DPR RI, bahwa hal ini telah disampaikan kepada Menteri Kesehatan RI, namun sampai saat ini masih belum menerima jawaban.

## **BAB III KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

### **A. KESIMPULAN**

- 1) PT PLN (Persero)
  - Menyelesaikan pelaksanaan pemasangan penangkal petir agar kondisi padam dalam situasi tertentu akibat gangguan cuaca pada transmisi tidak terjadi lagi
  - Memastikan dilaksanakannya program kerja mencapai cadangan sebesar paling sedikit 30% di tahun 2018 dan menjadikan MVPP hanya sebagai solusi efektif sementara.
- 2) PT PGN (Persero) bersama PT Pertamina (Persero) dan dukungan dari BPH Migas dan SKK Migas diminta untuk bisa mencari solusi agar harga gas berada di bawah \$9 per MMBTU dalam rangka peningkatan industri di Provinsi Sumatera Utara.
- 3) Khusus untuk illegal mining yang dilakukan dengan cara illegal drilling dan penyerobotan sumur, perlu didalami lebih lanjut dengan mitra kerja terkait antara lain Dirjen Migas, SKK Migas, PT Pertamina (Persero), PT Pertamina EP dan instansi lain yang diperlukan, agar tidak terjadi insiden lagi seperti di Peureulak.

### **B. REKOMENDASI**

Dengan memperhatikan kesimpulan di atas, Komisi VII DPR RI akan mengagendakan tindak lanjut melalui rapat-rapat dengan mitra kerja dan institusi terkait dalam masa persidangan berikut.

Demikian Laporan Kegiatan Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI ke Provinsi Sumatera Utara disampaikan, dengan harapan dapat memberikan manfaat bagi seluruh stakeholder.

Jakarta, 15 Mei 2018  
Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi VII

H. Gus Irawan Pasaribu, SE.Ak, MM, CA